

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola suatu anggaran yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah. Pengelolaan suatu dana tentu tidak lepas dari adanya tata cara pengelolaan keuangan yang baik. Tujuan utama tata kelola keuangan yang baik adalah menciptakan kinerja pemerintahan yang efisien, efektif, dan ekonomis yang dalam tugasnya pemerintah daerah dibantu oleh perangkat desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya (R.Bintarto, 2010; 6). Hasil dari

perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah. Kewenangan yang telah diperoleh dalam pembuatan kebijakan daerah terkait dengan pemberian pelayanan, peningkatan peran serta prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu diperlukan adanya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan sangat efektif jika dana desa dipergunakan tepat sasaran.

Otonomi desa sebenarnya dapat dijadikan suatu harapan dan juga sebuah tantangan bagi pemerintah desa serta masyarakat desa. Harapan dalam hal ini diartikan bahwa masyarakat desa dapat memberikan aspirasi dan kontrol terhadap birokrasi pemerintah desa, sehingga pemerintah desa dapat merespon secara langsung apa yang telah diharapkan masyarakat desa, sedangkan yang dikatakan sebagai sebuah tantangan bagi pemerintah desa dalam membuat kebijakan sesuai dengan anggaran yang dimiliki. APBDes harus menjadi sebuah cerminan serta tolak ukur dan harapan serta tuntutan masyarakat yang nantinya dapat diwujudkan oleh pemerintah desa. Peran pemerintah dalam perencanaan dan penyusunan APBDes diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat desa sehingga tidak lagi masuk dalam kategori desa tertinggal.

Peranan pemerintah desa dibutuhkan dalam menunjang pembangunan. Perubahan sosial dalam pembangunan dijalankan melalui pemerintah desa. Pemerintah desa menjalankan perannya secara efektif dan efisien perlu terus dikembangkan agar dapat sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya, sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas objek pembangunan, tetapi dapat memprosisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tertuang bahwa dalam melakukan penyelenggaraan desa didasarkan pada beberapa azas, antara lain: kepastian, tertib kepentingan umum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, partisipatif, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, Efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, kearifan lokal, serta keberagaman. Pemerintah desa di Kabupaten Subang harus menjalankan penyelenggaraan desa berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2007, bahwa wilayah Kabupaten Subang terbagi menjadi 30 Kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 245 desa dan 8 kelurahan, dimana pusat pemerintahan berada di Kecamatan Subang. Kabupaten subang merupakan salah satu daerah otonom yang sedang berkembang di Jawa Barat. Hal tersebut adalah implikasi dari sejumlah kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerahnya. Pembangunan merupakan bagian dari sekian program yang telah ada pada pemerintah Kabupaten Subang yang mendapatkan daya Tarik dan perhatian cukup besar dari masyarakat Subang itu sendiri. Beberapa diantaranya dapat dilihat dari sejumlah program pemberdayaan masyarakat desa seperti

Desa Cerdas (*Smart Village*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, meliputi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terdapat enam indikator keberhasilan penerapan Desa Cerdas / smart village yaitu : *Smart People*, *Smart Economy*, *Smart Governance*, *Smart Life*, *Smart Environment*, dan *Smart Mobility*. Selain desa cerdas, pemerintah desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam mengelola segala potensi ekonomi, kelembagaan, SDA, serta SDM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk menciptakan kinerja yang baik dalam mewujudkan keuangan pemerintah desa yang efisien, ekonomis, dan efektif.

Kinerja dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan *job performance* atau *actual performance* yang merupakan tingkat keberhasilan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja bukan merupakan karakteristik individu, seperti bakat, atau kemampuan, namun merupakan perwujudan dari bakat ataupun kemampuan itu sendiri. Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dalam satu periode tertentu. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Penyelesaian tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya dimiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kinerja merupakan hasil yang dicapai pegawai dalam mengembangkan tugas dan pekerjaannya yang berasal dari organisasi. Kinerja juga merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh individu melalui proses dari organisasi atau perusahaan yang

dapat diukur secara konkrit dan dibandingkan melalui standar yang telah ditentukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah factor individu, variabel psikologi dan variable organisasi. Variabel individu meliputi kemampuan dan keterampilan baik fisik maupun mental, latar belakang seperti keluarga, tingkat social dan pengalaman, demografi menyangkut umur, asal-usul dan jenis kelamin. Sedangkan variabel psikologis meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi.

Kinerja merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja pemerintah daerahnya secara baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintahan. Kinerja keuangan di pemerintahan desa sangat membutuhkan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam pengelolaan dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel yang mana salah satunya bisa diukur melalui *value for money*.

Value For Money dapat dikatakan sebagai inti dari pengukuran kinerja pada sebuah organisasi pemerintah yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi,

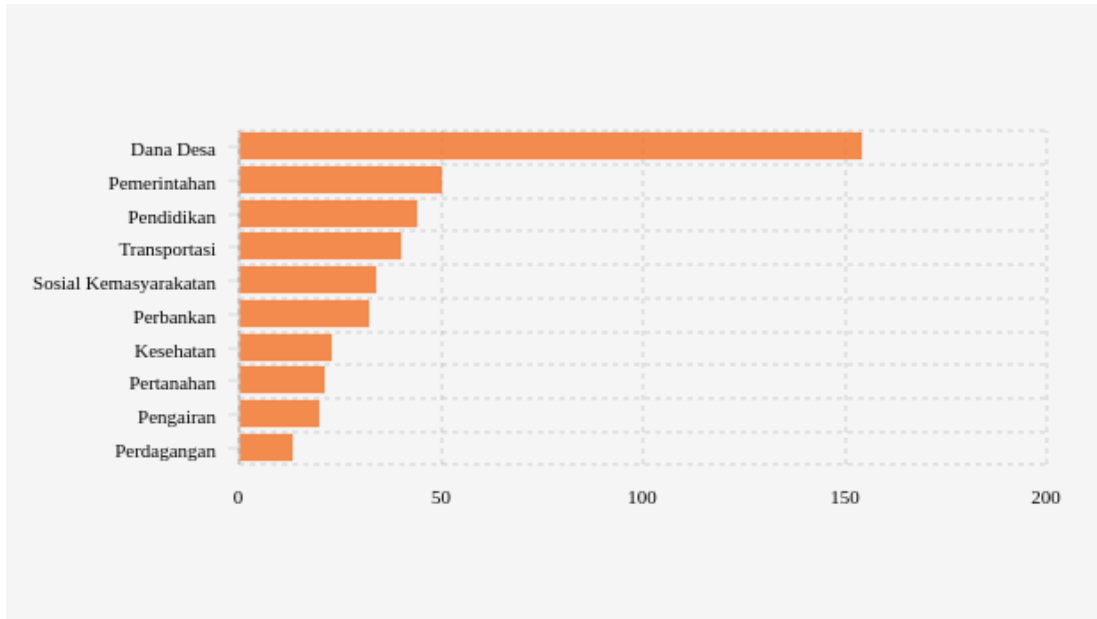
efisiensi, dan Efektivitas. Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian, yaitu indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan (Efektivitas). Sedangkan kinerja adalah gambaran terkait suatu tingkat untuk mencapai kegiatan, program, kebijakan tertentu dengan tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi yang ada dalam strategi perencanaan organisasi tersebut. Kinerja keuangan organisasi sector public dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pengertian *value for money* menurut Bastian (2006,279) menyebutkan bahwa *value for money* merupakan konsep yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pengukuran kinerjanya. *Value for money* tidak bisa terlepas dari tiga elemen utamanya yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang masing-masing elemen memiliki kontribusi untuk menilai kinerja organisasi sektor publik. Ekonomis berarti cara menggunakan sesuatu hal secara hati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik. Ekonomis didefinisikan sebagai perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan output value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi atau daya guna adalah bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Jadi efisiensi ini diukur dari rasio output dan cost. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standard kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan sehingga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara

pencapaian tujuan dengan output yang dihasilkan. Efektivitas dapat dikatakan sebagai tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Substansi Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas pengukuran kinerja berdasarkan alokasi biaya (ekonomi dan efisien) dan indikator kualitas pelayanan. Dengan demikian teknik ini sering disebut dengan pengukuran 3E yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi merupakan hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumberdaya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). (Angga Pratama, dkk 2020,130-138). Kegiatan operasional pemerintah desa dalam memperbaiki kinerja keuangan bisa dikatakan baik jika dalam menjalankan tugasnya menggunakan metode *value for money*, namun masih saja terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya terutama dalam penggunaan APBDes. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sector anggaran dana desa, Berikut Grafik kasus korupsi yang terjadi di Indonesia

dengan berbagai sektor :



Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/>

Gambar 1.1

Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Sektor di Indonesia pada tahun 2021

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana korupsi paling banyak terjadi pada sektor anggaran dana desa yakni 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.233.000.000.000, beberapa kasusnya terjadi pada beberapa pemerintah desa di Kabupaten Subang yaitu dugaan penyimpangan anggaran di Desa Mayangan Kecamatan Legonkulon tahun 2014-2021, penyimpangan pemungutan pemanfaatan lahan di Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara, Sedangkan kasus ketiga, dugaan penyimpangan anggaran di Desa Anggasari Kecamatan Sukasari. (jabarpress, 2022). Kasus tersebut dapat

mempengaruhi Efektivitas, ekonomisasi, dan efisiensi keuangan pemerintah desa sehingga kinerja keuangan pemerintah desa akan terganggu.

Berdasarkan hasil riset awal, melalui wawancara dengan beberapa masyarakat desa di Kabupaten Subang ditemukan bahwa banyak keluhan masyarakat desa mengenai pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan banyaknya kebutuhan masyarakat umum tidak memadai seperti jalan berlubang, jembatan rusak, serta ruang terbuka hijau yang tidak tersedia. Kebutuhan masyarakat umum yang sudah memadai akan terlaksana jika kinerja keuangan desa dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Penulis memilih kinerja keuangan pemerintahan desa sebagai bahan penelitian dikarenakan kinerja keuangan pemerintahan desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa. Oleh karena itu penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN METODE VALUE FOR MONEY PADA SELURUH PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SUBANG”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Temuan 154 kasus korupsi dana desa oleh Indonesia *corruption watch* (ICW), termasuk salah satunya ada dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Subang
2. Keluhan masyarakat mengenai kurang efektivinya dari pemanfaatan anggaran dana desa sehingga menyebabkan tidak memadainya fasilitas umum yang ada di pemerintah desa

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas kinerja pemerintah desa di Kabupaten Subang pada Tahun 2021?
2. Bagaimana peringkat kinerja pemerintah desa di Kabupaten Subang Pada Tahun 2021

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui rasio ekonomis, rasio efisiensi, rasio Efektivitas kinerja seluruh pemerintah desa di Kabupaten Subang pada tahun 2021
2. Untuk mengetahui peringkat kinerja pemerintah desa di Kabupaten Subang

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mendukung pengembangan terori yang telah ada, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai kinerja pemerintahan desa dengan metode value for money.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penulis diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan, diantaranya :

1. Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai kinerja pemerintahan desa dengan metode value for money di kabupaten subang

2. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran atau referensi bagi pembaca mengenai kinerja pemerintah desa dengan metode value dor money di kabupaten subang

3. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi guna menentukan pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah mengenai kinerja pemerintah desa di kabupaten subang.

